



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL **BAHAN PEMERIKSAAN** PERHATIAN KHUSUS

Tsk Jalan Kepahiang Berjamaah

Penyidik Koordinasi ke BPKP

BENGKULU – Kasus korupsi proyek jalan di batas Kota Kepahiang ke simpang kantor Bupati Kepahiang tahun 2017 yang sedang disidik Polda Bengkulu sebentar lagi akan ada tersangkanya. Informasinya, jumlah tersangka yang akan ditetapkan itu lebih dari dua orang berjamaah.

Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP. Sudarno tidak menampik bahwa jumlah tersangka bisa lebih dari 1 orang. Ini disampaikannya saat diwawancarai **RB** kemarin (26/2) apakah calon tersangka berjamaah.

“Semua serba mungkin. Tapi kita bicarannya sesuai fakta. Kita tunggu saja yang jelas proses terus berjalan. Kalau menentukan waktu penetapan tersangkanya kita belum bisa,” ujar Sudarno.

Dikatakan Sudarno, saat ini penyidik selain sedang berusaha melengkapi alat bukti sebelum menetapkan para tersangka juga sedang berkoordinasi dengan BPKP untuk meminta audit atau penghitungan nilai kerugian negara dari proyek/pekerjaan tersebut. “Kita masih koordinasi dengan BPKP untuk mintai audit kerugian negara,” terang Sudarno.

Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Mulyadi alias Nining mengatakan saat pekerjaan jalan di Kepahiang tahun 2017 itu dirinya belum bertugas di PUPR Provinsi. Namun informasi yang ia dengar bahwa PPTK-nya saat itu Candra dan Satkernya, Beny.

“Saya belum kenal dengan PPTKnya saat itu. Tapi kalau tidak salah namanya Candra. Sedangkan Satkernya bernama Beny yang merupakan Kabid BM tahun 2017. Kalau saya kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang diusut polda. Saya tidak pernah dimintai keterangan ataupun diperiksa terkait kasus ini karena pada saat proyek itu berjalan saya belum di PU Provinsi,” ujar Wahyuni.



SUDARNO

Informasi yang **RB** terima, pihak pelaksana paket proyek dengan pagu Rp 31,6 miliar tersebut adalah PT. Sindang Brother yakni perusahaan di Lubuk Linggau. Disebutkan bahwa direktornya saat kasus jalan ini disidik Polda, memilih melarikan diri hingga saat ini jadi buronan.

Terpisah, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari dapil Kepahiang, Edi Sunandar yang diinformasikan sempat diperiksa Polda Bengkulu beberapa waktu lalu, membantah. “Tidak pernah, saya belum pernah diperiksa,” tandasnya.

Ditanya dimana letak kesalahan atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek yang penganggarnya melalui pembahasan di DPRD provinsi itu, Edi belum mau berkomentar. “Saya rasa itu sudah ranahnya Polda. Saya belum mau komentar dulu lah. Biar sekarang penyidikan berjalan ya kita tunggu saja. Tentu penyidik punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri,” ujar Edi.

Untuk diketahui, diusutnya kasus ini sejak penyidik menerima laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam pekerjaan preservasi rehabilitasi jalan batas kota Kepahiang - Simpang Kantor Bupati Kepahiang. Pekerjaan dengan nilai pagu Rp 31,6 miliar itu diduga telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Pekerjaan tidak sesuai dengan volume yang terdapat dalam surat perjanjian kerja (kontrak) sehingga menimbulkan kerugian negara. (tew)